



SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA

Sosialisasi Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK)

Disampaikan pada kegiatan rakor

kediklatan satu pintu

Selasa, 15 Agustus 2023





1.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat 3 yang menyatakan bahwa :

1. Setiap Aparatur Sipil Negara memiliki hak yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi
2. Perangkat Daerah WAJIB untuk Menyusun Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi

2.

Permendagri 11 Tahun 2018 Pasal 61 Ayat 2 dan Perka LAN 10 Tahun 2018 tentang Perencanaan bangkom disusun berdasarkan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK)

- **AKPK untuk jenis penyelenggaraan pengembangan kompetensi tahun 2025 dan 2026 :**



Pendidikan (Tugas Belajar)

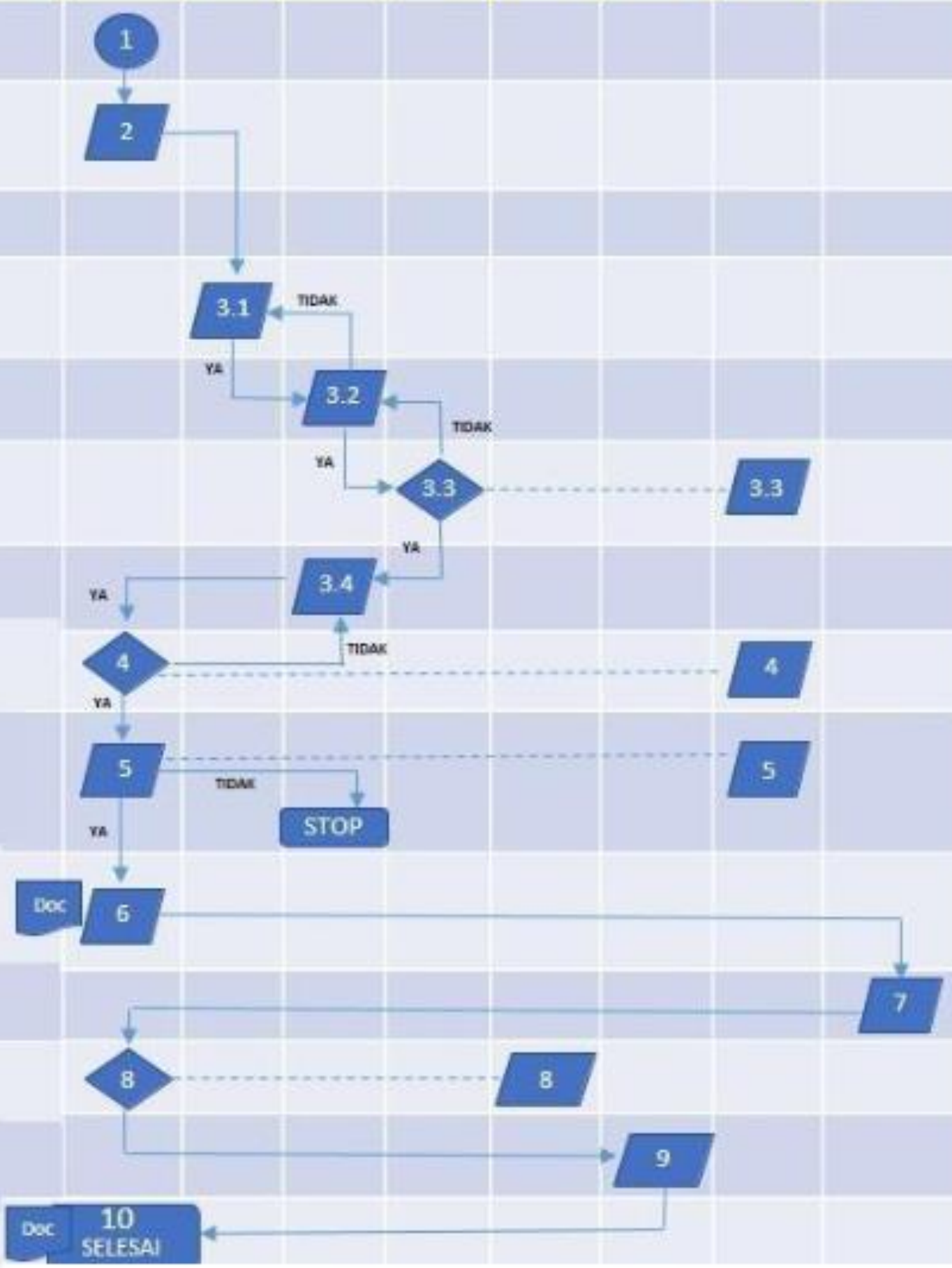


Pelatihan

- **Dasar untuk penerbitan rekomtek pelatihan (hanya untuk kompetensi teknis) perangkat daerah**
- **Input hasil AKPK melalui aplikasi Musrenbangkom pada Simdiklat (Jadwal Sosialisasi Kepada Perangkat Daerah/PD : 28-30 Agustus 2023)**

ALUR PROSES BISNIS

Tanggal Pelaksanaan	Uraian	Tim AKPK	Admin UKPD	Admin PD	Kepala PD	Kepala BPSDM	UPT Pusdatin BPSDM	Wali Program	Bidang Penyelenggara Bangkom
Juli-Agustus 2023	1. Membuat Surat Edaran BPSDM membuat surat edaran yang menyatakan dimulainya tahapan pengajuan usulan Bangkom	1							
4 Agustus & 28-30 Agustus 2023	2. Membuka Tahapan Usulan • Entry Katalog Bangkom • Peperan Teknis input Sistem kepada Admin PD/UKPD	2							
31 Agustus-3 Oktober 2023	3. Mengajukan Usulan Pengajuan usulan Pengembangan Kompetensi dengan bisnis proses sbdr:								
	3.1 Usulan dari UKPD • Admin UKPD mengusulkan Bangkom • Usulan UKPD akan terkirim ke Admin PD terlebih dahulu untuk dikompilasi dan diverifikasi internal	3.1							
	3.2 Usulan dari PD • Admin PD mengajukan usulan Bangkom • Admin PD melanjutkan usulan UKPD dan usulan yang ada di unit Eselon 2 kepada Kepala PD	3.2							
	3.3 Validasi Usulan oleh Kepala PD • Kepala PD melakukan verifikasi yang dikirimkan oleh Admin PD • Perangkat Daerah melanjutkan usulan PD dan UKPD yang telah diverifikasi untuk dilanjutkan kepada Admin PD	3.3							
	3.4 Cetak dan Unggah Surat Usulan	3.4							
4-6 Oktober 2023	4. Verifikasi lanjutan oleh BPSDM Penyelenggara BPSDM melakukan verifikasi lanjutan yang dikirimkan oleh PD, usulan yang ditolak akan dikembalikan ke PD dan UKPD untuk diperbaiki jika diperlukan (Indikator: Deadline Waktu dan Aspek Formil)	4							
9-20 Oktober 2023	5. Pembahasan One on One Meeting BPSDM Bersama PD membahas usulan Bangkom yang telah diajukan.	5							
Minggu Pertama November 2023	6. Musrenbangkom/LCM (Learning Council Meeting) • Cetak Berita Acara Pembahasan Musrenbangkom • Berdasarkan skala prioritas pada tahun berjalan dan berdasarkan rumpun kompetensi • Usulan insidental dari pimpinan Musrenbangkom	Doc 6							
	7. Penempatan Jadwal Bidang penyelenggara rencana Bangkom memberikan jadwal pelaksanaan Bangkom	7							
	8. Penetapan Usulan Kepala BPSDM menerbitkan SK Kalender Bangkom pada tahun berjalan	8							
	9. Posting usulan SIMDIKLAT Penyelenggara UPT Pusdatin BPSDM melakukan posting usulan yang telah disetujui pada Musrenbangkom ke aplikasi SIMDIKLAT	9							
	10. Membuat Surat Keputusan Gubernur Usulan yang telah ditetapkan selanjutnya disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur.	Doc 10 SELESAI							





Formulir Deskripsi Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi



Unit Kerja Pengusul

(diisi nama unit kerja eselon II)

Usulan Pengembangan Kompetensi

(diisi judul bangkom yang diusulkan)

Deskripsi Diagnosa Kebutuhan Pembelajaran

Diisi penjelasan singkat mengapa pengembangan kompetensi yang diusulkan diperlukan oleh OPD pengusul, misal:

- § Adanya gap kuantitas: misal jumlah SDM bendahara saat ini ada 2 orang sementara yang dibutuhkan ?? orang, sehingga diperlukan tambahan sebanyak ? orang. Gap disebabkan karena SDM yang ada mutasi, pensiun, meninggal, dsb.
- § Adanya gap kualitas: misal tantangan penilaian property di Jakarta makin kompleks dengan adanya gedung, bangunan bawah tanah, pulau hasil reklamasi, jalan layang dsb. sehingga membutuhkan peningkatan kualitas kompetensi SDM yang ada.
- § Adanya target strategis pimpinan berupa program XXX yang dalam pelaksanaannya membutuhkan SDM dengan kompetensi YYY, sehingga diusulkan XXX

Target Strategis Pengembangan Kompetensi

Diisi penjelasan apa tujuan strategis yang menjadi dasar/berkaitan dengan pengusulan pengembangan kompetensi, misal: Melalui peningkatan jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang pemeriksaan pajak diharapkan target peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya pajak self-assessment dapat meningkat menjadi 95 % dalam 5 tahun, target RKPT tahunan dapat terpenuhi 100 %, annual audit coverage ratio/cakupan area pemeriksaan tahunan bisa mencapai 5% dari populasi wajib pajak.

Sasaran Pengembangan Kompetensi

Diisi jumlah dan profil SDM yang menjadi sasaran pelatihan, misal: 15 pejabat pengelola barang

Bentuk dan durasi pengembangan kompetensi

Diisi bentuk pengembangan kompetensi yang diusulkan, misal Pelatihan berbasis praktek lapangan/corpu – 2 bulan dengan system on (5 hari) dan off (55 hari), Bimbingan Teknis secara online selama 2 hari

Usulan jadwal pelaksanaan

Juni – Juli 2025

TEMPLATE FORMULIR DESKRIPSI AKPK

- Tersedia di aplikasi Musrenbangkom pada Simdiklat



Data Pendukung AKPK

- RPD 2023–2026
- Renstra
- Sasaran Kinerja
- Indikator Kinerja Utama
- SOTK (Uraian Tugas PD dalam Pergub 57 tahun 2022)
- Peta Jabatan Terbaru yang sudah di Tanda tangani Biro ORB
- Rekapitulasi profil seluruh PNS di masing-masing PD



WAJIB diinput di dalam link berikut ini:

<https://bit.ly/DataPerangkatDaerahMusren2023>



Maksimal Jumat, 18 Agustus 2023

THANK YOU!

Any Question



ppsdm

Provinsi DKI Jakarta



JakCorpU
Cepat Tepat Menuju Terdepan

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KOMITMEN SERTA DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH

BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI DASAR, MANAJERIAL
DAN FUNGSIONAL (PKDMF)
TAHUN ANGGARAN 2023





STRUKTUR ORGANISASI BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR, MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL SESUAI PERGUB NO. 57 TAHUN 2022

- Kelompok Sub Subtansi**
PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR DAN KADER
- Kelompok Sub Subtansi**
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL
- Kelompok Sub Subtansi**
PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSIONAL



BPSDM MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

KEGIATAN YG SEDANG & AKAN DILAKSANAKAN:

Kelompok SUB Substansi PK Dasar dan Kader :

1. Pengarahan Orientasi PPPK Formasi 2022 sebanyak ± 6000 orang (September)
2. Pelaksanaan Bangkom bagi PPPK Formasi 2021 (Oktober dan November)
3. Pelaksanaan Susulan Penguatan Integritas, Moralitas & Etika Alumni Latsar Formasi 2019 (Oktober)

Kelompok SUB Substansi PK Manajerial:

1. Penyelenggaraan Diklat PKA (Juli – Desember)
2. Penyelenggaraan Diklat PKP (Juli – Desember)

Kelompok SUB Substansi PK Fungsional:

1. Penyelenggaraan Diklat Kepala Sekolah (Agustus – September)
2. Penyelenggaraan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Level 1 (September - November)
3. Penyelenggaraan Diklat PPNS (Agustus – Desember)
4. Penyelenggaraan Diklat Jabatan Fungsional

PEMBAHASAN & PERMASALAHAN



Kelompok SUB Substansi PK Dasar & Kader :

- 1. Menindaklanjuti arahan Bapak Pj. Gubernur terkait pembinaan sikap perilaku CPNS dan PNS muda, BPSDM telah menyelenggarakan pelatihan Penguatan Integritas, Moralitas dan Etika bagi CPNS Formasi Tahun 2021 dan Alumni Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022.**
- 2. Berdasarkan pendataan terakhir, masih ada PNS muda (alumni Latsar CPNS Formasi Tahun 2019) yang tidak hadir pada pelatihan dimaksud karena sedang mengambil cuti melahirkan dan ada juga yang sedang mengikuti pelatihan fungsional.**

Kelompok SUB Substansi PK Dasar & Kader :

3. BPSDM akan melakukan pemanggilan kembali kepada para PNS muda (alumni Latsar CPNS Formasi Tahun 2019) yang belum mengikuti kegiatan dimaksud. Rencananya di Minggu ke 4 Bulan Oktober 2023.

Pelaksanaannya selama 2 hari. Mohon kerja samanya untuk menugaskan pegawai tersebut kecuali yang benar-benar tidak bisa karena bentrok dengan pelatihan fungsional. Rekapitulasi kehadiran tsb akan dilaporkan ke Bapak Pj. Gubernur cc Bapak Sekda.

Kelompok SUB Substansi PK Manajerial:

1. Pemanggilan peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan baik Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) maupun Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) adalah berdasarkan surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah (PD) oleh karena itu Pejabat struktural yang mendapat panggilan mengikuti PKA dan PKP sebagaimana usulan dari PD agar jangan ditahan atau ditunda pelatihannya.
2. Hal tsb dikuatkan dengan Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, bagi PNS yang telah duduk dalam jabatan tinggi madya, jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti Pelatihan Struktural wajib ditetapkan sebagai Peserta oleh pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Struktural paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak duduk dalam jabatan.

Kelompok SUB Substansi PK Manajerial:

3. Per tahun ini kepada peserta PKA dan PKP diminta menyampaikan surat pernyataan kepemilikan Aksi Perubahan sebagaimana format dari BPSDM. Aksi Perubahan yang dihasilkan peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan merupakan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingat inovasi tersebut lahir dari kegiatan pelatihan yang dibiayai dari APBD dengan pembimbingan dari mentor dan coach.

Kelompok SUB Substansi PK Fungsional:

1. Pemanggilan peserta Pelatihan di Subbid Fungsional adalah berdasarkan surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah (PD) oleh karena itu para peserta yang mendapat panggilan mengikuti pelatihan sebagaimana usulan dari PD agar mengikuti pelatihan jika memang sakit harus ada surat keterangan sakit dari dokter.

Kelompok SUB Substansi PK Fungsional:

2. Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional. Dan Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2023. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penilaian Angka Kredit JF berdasarkan konversi predikat Evaluasi Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Permen PANRB ini dilaksanakan untuk evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155) yang ditetapkan untuk periode kinerja mulai 1 Januari 2023.

Kelompok SUB Substansi PK Fungsional:

3. Menindaklanjuti point Nomor 2, bahwa untuk Pegawai yang telah menduduki Jabatan Fungsional agar mengusulkan pelatihannya dan nanti BPSDM yang akan segera berkoordinasi dengan Instansi Pembina Pusat sampai Uji Kompetensinya sesuai Jabatan Fungsional tersebut.

TERIMA KASIH



RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATU PINTU



Oleh:

UPT PUSAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
BPSDM Provinsi DKI Jakarta

JAKARTA PUBLIC POLICY CENTER



Pengembangan Kompetensi Teknis Umum (1/2)

Diklat Komunikasi Publik

Jumlah: 150 Orang
Pelaksanaan: Mar - Juli

Diklat Manajemen BLUD Kesehatan

Jumlah: 90 Orang
Pelaksanaan: Mei - Juli

Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas

Jumlah: 150 Orang
Pelaksanaan: Mar - Juni

Diklat Manajemen BLUD Corpu Dinas Pendidikan

Jumlah: 30 Orang
Pelaksanaan: Juni

Penyelesaian Sengketa Hukum Bagi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah: 90 Orang
Pelaksanaan: Juli -Agus

Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana) /JITUPASNA

Jumlah: 90 Orang
Pelaksanaan: Mei - Juli

Diklat Manajemen Kinerja

Jumlah: 60 Orang
Pelaksanaan: Mei - Juli

Diklat Penyusunan Peraturan Gubernur

Jumlah: 60 Orang
Pelaksanaan: Juli - Agust

Pengembangan Kompetensi Teknis Umum (2/2)

OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)

Jumlah: 150 Orang
Pelaksanaan: Agust - Okt

Diklat Coaching & Conseling

Jumlah: 60 Orang
Pelaksanaan: Okt

Manajemen Pengelolaan Gedung Rusun Corpu

Jumlah: 30 Orang
Pelaksanaan: September

Diklat Manajemen Reses

Jumlah: 20 Orang
Pelaksanaan: Okt

Diklat Pengelolaan Gedung Pemerintah

Jumlah: 60 Orang
Pelaksanaan: Sept

Diklat Komputer (Microsoft Office)

Jumlah: 90 Orang
Pelaksanaan: Nov



Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural (1/2)

Diklat Manajemen Proyek Corpu

Jumlah: 30 Orang
Pelaksanaan: Maret

Diklat Bahasa Inggris For Tourism

Jumlah: 30 Orang
Pelaksanaan: Mei

Diklat Pengendalian Sistem Intern Pemerintah (SPIP)

Jumlah: 120 Orang
Pelaksanaan: Mei - Juli

Diklat Bahasa Jepang Dasar

Jumlah: 30 Orang
Pelaksanaan: Juli

Diklat Manajemen Strategik

Jumlah: 60 Orang
Pelaksanaan: Maret

Diklat Bahasa Inggris For Correspondence

Jumlah: 30 Orang
Pelaksanaan: Mei

Diklat Kerja Sama Internasional

Jumlah: 30 Orang
Pelaksanaan: Juni

Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (MPPD)

Jumlah: 90 Orang
Pelaksanaan: Juli - August

Bimtek Pengelolaan Aset

Jumlah: 120 Orang
Pelaksanaan: Mar - Juni

Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan

Jumlah: 120 Orang
Pelaksanaan: Mei - Juli

Diklat Bahasa Prancis Dasar

Jumlah: 30 Orang
Pelaksanaan: Juni



Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural (2/2)

Diklat Manajemen Stress

Jumlah: 90 Orang
Pelaksanaan: Juni - Sept

Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan

Jumlah: 30 Orang
Pelaksanaan: September

Diklat Work Life Balance Management

Jumlah: 90 Orang
Pelaksanaan: Sept - Okt

Diklat Pembangunan Berkelanjutan

Jumlah: 30 Orang
Pelaksanaan: Oktober

Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Jumlah: 60 Orang
Pelaksanaan: Oktober



Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pengiriman Kediklatan

TEMA PENGIRIMAN KEDIKLATAN

Internalisasi Core Values ASN
BerAKHLAK

Effective Communication & Handling
Customer Complaints

Customer Experience Enhancement

Lean Management System

Bahasa Isyarat dan Pengenalan Dunia
Tuli

Public Speaking & Up Lifting Delight Service, Dan
Lainnya

Pengembangan Kompetensi ASN yang tidak diselenggarakan oleh BPSDM namun dibutuhkan oleh Perangkat Daerah dengan tema – tema yang bersifat Teknis, Pengembangan Diri dan Soft Skill sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dapat mengusulkan Permohonan Fasilitas Pengiriman Kediklatan sesuai kebutuhan dengan :

1. Mengajukan Surat **Permohonan Fasilitas** dan Jumlah Usulan Peserta Pengiriman Kediklatan ke BPSDM Provinsi DKI Jakarta
2. Mengajukan **usulan Pengiriman Kediklatan** dalam Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi pada Murenbangkom
3. Melampirkan **rekomendasi** Provider beserta proposal pelatihan bagi pelatihan yang bersifat teknis dan Urgensi Pelaksanaan Pelatihan

TERIMA

KASIH



bpsdm
Provinsi DKI Jakarta



Jakarta
Public Policy
Center



SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA

Rekomendasi Pengembangan Kompetensi Satu Pintu, Pelaksanaan Tugas Belajar, Magang dan Pelatihan Luar Negeri

Selasa, 15 Agustus 2023





1.

Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017

Tentang Pengembangan Kompetensi dan
Sertifikasi Profesi ASN Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta

Pasal 57 dan 58

Kebijakan Pengembangan Kompetensi Satu Pintu
di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



2.

Tata Laksana

1. SKPD/UKPD memprogramkan Diklat Teknis Substantif melalui Kebijakan Pengembangan Kompetensi Satu Pintu di bawah pengaturan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi BPSDM



3.

- 2. Mekanisme Kebijakan Pengembangan Satu Pintu sebagaimana sebagai berikut :**
- a. perencanaan program;**
 - b. persiapan;**
 - c. pelaksanaan;**
 - d. pedoman satuan biaya;**
 - e. supervisi dan evaluasi;**
 - f. penerbitan STTP, transkrip nilai, sertifikat, piagam dan sejenisnya; dan**
 - g. pelaporan hasil kegiatan.**



4.

- 3. Dalam memprogramkan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPKD/UKPD wajib berkoordinasi dengan BPSDM dimulai dari:**
- a. perencanaan program;**
 - b. pelaksanaan;**
 - c. pengendalian;**
 - d. supervisi evaluasi; dan**
 - e. pelaporan.**



5.

- 4. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :**
- a. program pengembangan kompetensi yang direncanakan adalah jenis Diklat Teknis dan sesuai dengan kebutuhan SKPD/UKPD;**
 - b. jumlah dan rincian anggaran sesuai dengan standar cakupan biaya dan komponen pelaksanaan pengembangan kompetensi;**
 - c. jumlah peserta;**
 - d. kualifikasi pengajar;**
 - e. sarana dan prasarana;**
 - f. tenaga penyelenggara Diklat telah memiliki sertifikat Training Officer Course (TOC) dan Management of Training (MOT); dan**
 - g. bahan ajar yang terdiri dari kurikulum, modul dan bahan tayang.**



6.

Mekanisme Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Satu Pintu Mekanisme Kebijakan Pengembangan Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- 1. Tahap perencanaan dengan ketentuan sebagai berikut :**
 - a. SKPD/UKPD mengusulkan program Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif dan kegiatan sejenisnya;**
 - b. Pengusulan program sebagaimana dimaksud pada huruf (a) disampaikan paling lambat 1 tahun sebelum pengembangan kompetensi dilaksanakan;**
 - c. Program yang diusulkan akan dibahas dalam tim BPSDM dan SKPD/UKPD terkait; dan**
 - d. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) menjadi bahan rekomendasi untuk SKPD/UKPD mengusulkan kegiatan pengembangan kompetensi.**



7.

- 2. Tahap pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut :**
 - a. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Keputusan Program Pengembangan Kompetensi;**
 - b. Penyusunan Keputusan Program Pengembangan kompetensi mengacu pada pasal 28 huruf (a); dan**
 - c. Keputusan Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditandatangani oleh Kepala Badan.**



8.

3. Tahap supervisi dan evaluasi.

- a. BPSDM melaksanakan supervisi dan evaluasi pengembangan kompetensi di SKPD/UKPD; dan**
- b. Supervisi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilaksanakan setiap triwulan.**

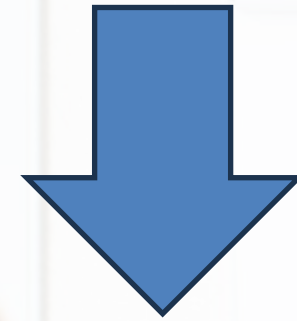


9.

- 4. Penomoran dan penandatanganan STTP, sertifikat, transkrip nilai, piagam, dan sejenisnya dilakukan oleh BPSDM mengacu pada Pasal 53.**
- 5. Kegiatan Kompetensi yang dilaksanakan SKPD/UKPD wajib melaporkan kepada Kepala BPSDM melalui pengembangan Sistem Informasi Kediklatan (Simdiklat)**

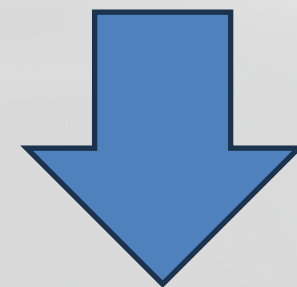


Pegawai Tugas Belajar



DIATUR DALAM:

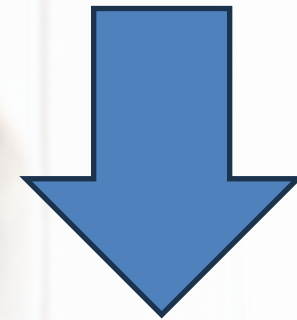
Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 dan
Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2018



SELEKSI CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR



Pelatihan Luar Negeri dan Magang bagi Pegawai



DIATUR DALAM:

Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2017

TERIMA KASIH



bpsdkm

Provinsi DKI Jakarta



JakCorpU
Cepat Tepat Menuju Terdepan

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 164 TAHUN 2017

Tentang MANAJEMEN PENGETAHUAN



DASAR PELAKSANAAN

- Pengumpulan asset terkait manajemen pengetahuan didasarkan dari **Peraturan Gubernur nomor 164 tahun 2017**
- Dengan **Metode Pengukuran:**
Realisasi target berupa **4 laporan (asset pengetahuan)** baik berbentuk **video** maupun **tulisan**.
- Batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal **5 bulan September** pada **Triwulan 3** dan Minggu pertama tanggal **5 bulan November** **Triwulan 4**.



KEBIJAKAN PELAKSANAAN



Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan adalah dengan mengintegrasikan asset pengetahuan yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah ke dalam suatu Sistem Manajemen Pengetahuan untuk dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.

01

Memberikan **pemahaman** kepada Pegawai ASN mengenai Manajemen Pengetahuan;

02

Mendorong organisasi untuk **berpartisipasi aktif** dalam kegiatan **berbagi pengetahuan** yang dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dan tolak ukur pelaksanaan pelayanan publik terbaik;

03

Mewujudkan **sinergitas** pelaksanaan Manajemen Pengetahuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah husus Ibukota Jakarta;

04

Mewujudkan Pegawai ASN yang **berkualitas dan kompetitif** serta organisasi yang efektif dan efisien.

TUJUAN MANAJEMEN PENGETAHUAN



MEKANISME PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

Manajemen Pengetahuan dilakukan dengan melakukan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki (dengan menghimpun Aset Pengetahuan)



Kriteria Aset Pengetahuan

Berdasarkan PERGUB Nomor 164 tahun 2017 Pasal 11 dan Pasal 13



Pengetahuan implisit (tacit) dan eksplisit

Contoh: Wawancara, Podcast



Aset langsung (berdasarkan pengalaman, pembelajaran dan keberhasilan dan kegagalan oleh narasumber)



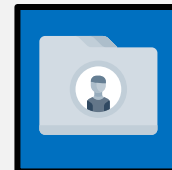
Aset tidak langsung (menghimpun aset pengetahuan yang sudah dimiliki organisasi)

Contoh: Webinar, Video tentang organisasi



Dapat berupa tulisan, foto, video, testimoni, hasil zoom rapat, dsb.

Reliable, repeatable, replicable
Contoh: Proyek Perubahan, Aktualisasi ASN



Tidak mengandung unsur politik dan/atau Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).



Dapat diakses dan dimanfaatkan oleh organisasi dan dishare ke publik



FORMAT PELAKSANAAN BERBAGI PENGALAMAN

- **Narasumber** = orang yang menjadi
- **Judul** = pengetahuan atau pengalaman terkait apa yang akan dibahas dalam sesi
- **Permasalahan** = latar belakang dilaksanakannya sesi berbagi pengalaman
- **Dampak** = hal-hal apa saja yang terpengaruh oleh permasalahan tersebut
- **Penyebab** = hal-hal apa saja yang membuat permasalahan tersebut muncul
- **Solusi perbaikan** = hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dan menghilangkan penyebabnya muncul kembali
- **Hasil perbaikan** = hasil dari penerapan solusi yang telah dipikirkan sebelumnya

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 164 TAHUN 2017
Tanggal 13 Oktober 2017

FORMULIR BERBAGI PENGALAMAN

Narasumber :
Judul (Title) :

Permasalahan (Problem)

Dampak (Impact)

Penyebab (Cause)

Solusi Perbaikan (Improvement Qualification)

Hasil Perbaikan (Improvement Result)

Jakarta,
Narasumber

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

TERIMA KASIH





RAPAT KOORDINASI KEDIKLATAN TAHUN 2023

Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran (JP) per Tahun

Mekanisme Perhitungan IP ASN bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

SELASA, 15 AGUSTUS 2023

Latar Belakang

Pergub 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

"BPSDM Provinsi DKI Jakarta Melaksanakan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta"



UU No.5 Tahun 2014 tentang ASNPs.21 Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk memperoleh pengembangan kompetensi

PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Insekda Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi minimal sebanyak 40 JP

Pemenuhan target sasaran khusus Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 tentang Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun

Update Biodata SIMPEG

	DI SIMDIKLAT	DI SIMPEG
NRK	[REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/> [REDACTED]
NIP	[REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/> [REDACTED]
Gelar Depan		<input checked="" type="checkbox"/>
Nama Lengkap	Riyan Adi Lesmana	<input checked="" type="checkbox"/> Riyan Adi Lesmana
Gelar Belakang	S. Komp	<input checked="" type="checkbox"/> S. Komp
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI	<input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI
Agama	Islam	<input checked="" type="checkbox"/> Islam
Status Pegawai	PNS	<input checked="" type="checkbox"/> PNS
Tempat Lahir	Bogor	<input checked="" type="checkbox"/> Bogor
Tanggal Lahir	[REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/> [REDACTED]
Alamat Rumah	[REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/> [REDACTED]
Kota	Kota Bogor	<input checked="" type="checkbox"/> Kota Bogor
Telepon Rumah	[REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/> [REDACTED]
Telepon Mobile/HP	[REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/> [REDACTED]
Nomor KTP	[REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/> [REDACTED]
NPWP	[REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/> [REDACTED]
Nomor Rekening Bank DKI	[REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/> [REDACTED]
Pendidikan Sesuai SK	S1, Institut Pertanian Bogor	<input checked="" type="checkbox"/> S1, INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TMT CPNS	01-04-2015	<input checked="" type="checkbox"/> 01-04-2015
TMT PNS	01-03-2017	<input checked="" type="checkbox"/> 01-03-2017
UKE/UKPD	Pusat Data dan Informasi Pengen	<input checked="" type="checkbox"/> PUSAT DATA DAN INFORMASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pangkat	Penata	<input checked="" type="checkbox"/> PENATA
Golongan	III/c	<input checked="" type="checkbox"/> III/C
TMT Pangkat	01-04-2023	<input checked="" type="checkbox"/> 01-04-2023
Eselon	NON-ESELON	<input checked="" type="checkbox"/> NON ESELON
TMT Eselon	01-04-2023	<input checked="" type="checkbox"/> 01-04-2023
Jabatan	KASATLAK SISTEM INFORMASI	<input checked="" type="checkbox"/> KASATLAK SISTEM INFORMASI

Pemutahiran Data Pegawai

Profil di SIMDIKLAT sama dengan di Simpeg

Perhitungan JP

simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id/sim-diklat/users/profile/manage

Riyan Adi Lesmana 14 Aug 2023 11:18:18

admin Home / Profil

Nama : Riyan Adi Lesmana
 NRK : ████████
 NIP : ████████████████████████████████
 JABATAN : KASATLAK SISTEM INFORMASI
 UNIT KERJA : PUSAT DATA DAN INFORMASI
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JP : 101
IP ASN : 40 (Dimensi Kompetensi)
 Unduh Biodata

Akun Saya:

Biodata SIMPEG Biodata & Kompetensi Ganti Password

Info Detail JP Pegawai

NAMA PELATIHAN	JENIS PELATIHAN	JP
SiJule - Creative Thinking	Teknis	1
SiJule - Critical Thinking	Teknis	1
Diklat Ujicoba Sistem	Teknis	2
SiJule - Leadership	Teknis	1
Pelatihan Customer Experience Enhancement BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Teknis	8
PELATIHAN DAN SERTIFIKASI REMOTE PILOT SESUAI CASR 107	Teknis	46
Podcast Rabu Belajar	Lainnya	40
SiJule - Self Leadership	Teknis	1
SiJule - Work Life Balance	Teknis	1

Info Detail IP ASN Pegawai

NILAI IP ASN	DIKLAT MANAJERIAL	DIKLAT FUNGSIONAL	DIKLAT TEKNIS (TOTAL 20 JP)	DIKLAT LAINNYA
40	0	0	22,5	17,5

<https://youtu.be/orb6Ag0Bn08>

Penambahan JP Pengembangan Kompetensi secara mandiri



Pemutakhiran Profil Pengembangan Kompetensi di Simdiklat :

Input dan **Validasi**

Pengembangan Kompetensi Lainnya

[+ Tambah Data](#)

Show entries Search:

No.	Nama Pengembangan Kompetensi	Kategori Pengembangan Kompetensi	Penyelenggara	Tahun	Sertifikat/ Dokumen Bukti	Actions
1	Prajabatan Golongan III Angkatan 197		Badan Diklat	2016	-	Edit Delete
2	ISO 9001:2015 Awareness and Internal Auditor	Teknis	Robere & Associates	2020		Edit Delete
3	ISO 37001:2016 (Anti Bribery Management System Awareness & Internal Auditor)	Teknis	BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan Robere & Associates	2021		Edit Delete

Showing 1 to 3 of 3 entries First Previous Next Last



Buku Panduan dan Video Tutorial

BUKU PANDUAN VALIDASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI



http://bit.ly/Panduan_ValidasiBangkom

TUTORIAL VALIDASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI



<https://bit.ly/TutorialValidasiBangkom>

BUKU PANDUAN PEMUTAKHIRAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI



http://bit.ly/Panduan_ValidasiBangkom

TUTORIAL PEMUTAKHIRAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI



<https://bit.ly/TutorialPemutakhiranBangkom>

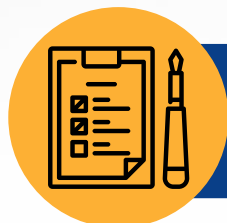


IP ASN

- PermenPANRB No.38 Tahun 2018 tentang Pengukuran IP ASN Instansi melakukan pengukuran IP ASN setiap tahun.
- Peraturan BKNN0.8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN

Merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Dimensi IP ASN :



Kualifikasi (25%)



Kinerja (30%)



Kompetensi (40%)

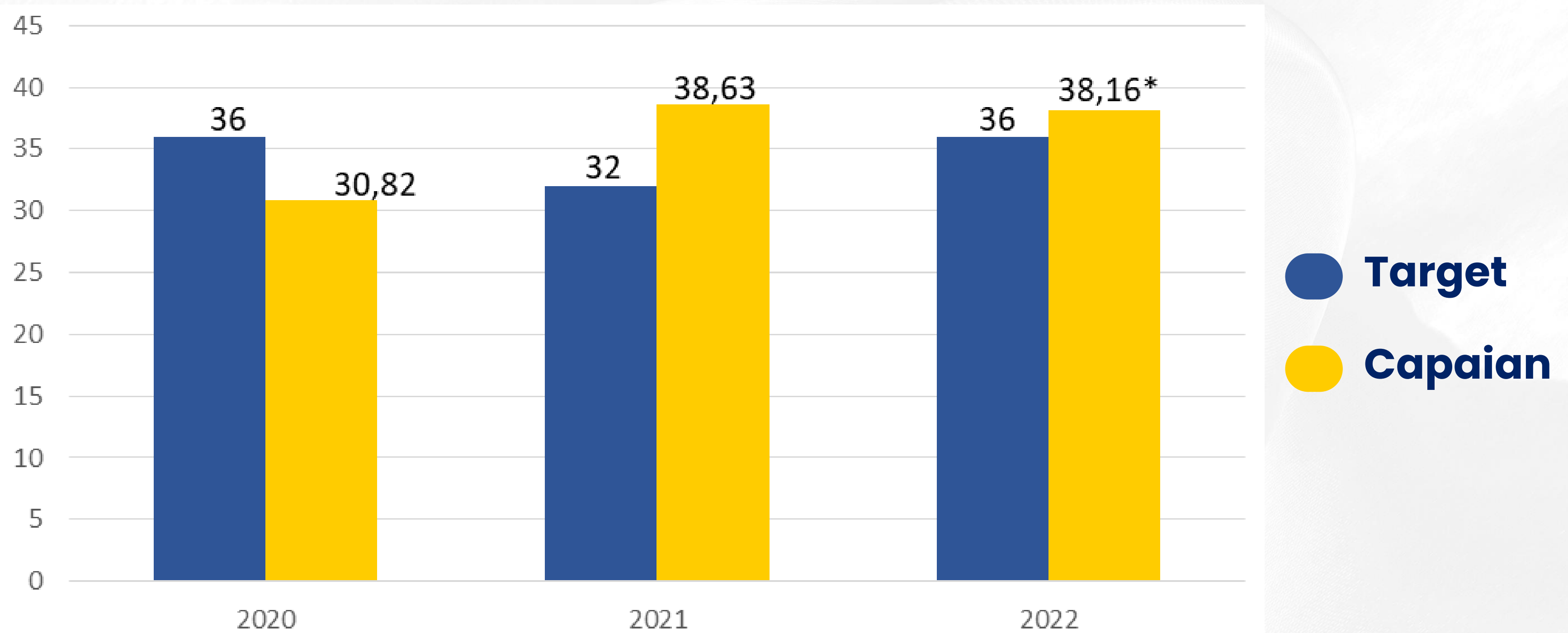


Disiplin (5%)

PENGHITUNGAN IP ASN DIMENSI KOMPETENSI (40%)

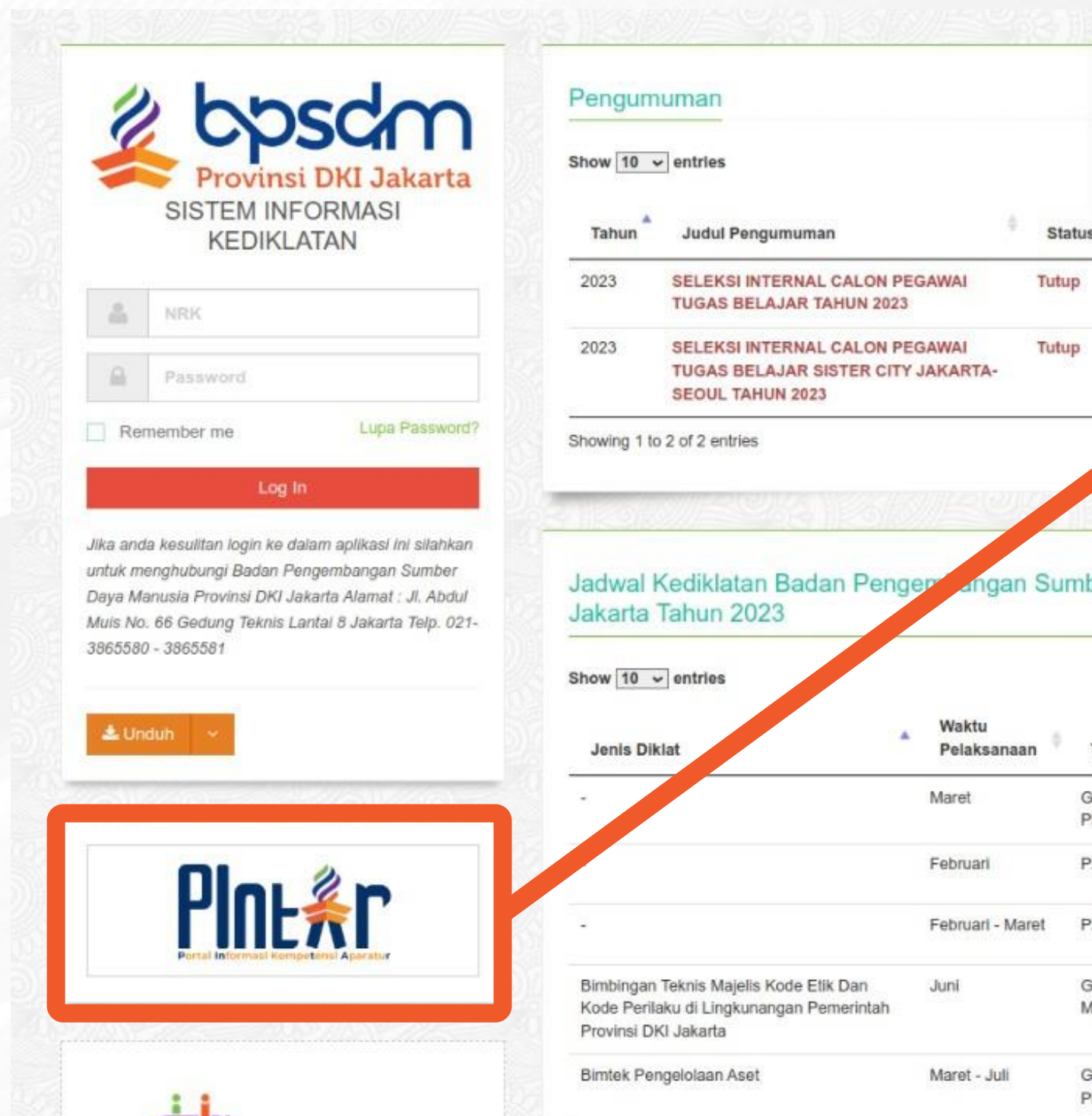
IP ASN	Diklat Kepemimpinan	Diklat Fungsional	Diklat Teknis 20 JP (tahun berjalan)	Seminar/Workshop /Lainnya (tahun berjalan)	JUMLAH
Struktural	15	-	15	10	40
Fungsional	-	15	15	10	40
Pelaksana	-	-	22,5	17,5	40

Hasil IP ASN Provinsi DKI Jakarta 3 Tahun terakhir





Aplikasi Portal Informasi Kompetensi Aparatur (PINTAR) BPSDM Provinsi DKI Jakarta



bpsdm
Provinsi DKI Jakarta
SISTEM INFORMASI
KEDIKLATAN

NRK
Password
 Remember me [Lupa Password?](#)
Log In

Jika anda kesulitan login ke dalam aplikasi ini silahkan untuk menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Alamat : Jl. Abdul Muis No. 66 Gedung Teknis Lantai 8 Jakarta Telp. 021-3865580 - 3865581

Unduh

PINTAR
Portal Informasi Kompetensi Aparatur

Pengumuman

Show 10 entries

Tahun	Judul Pengumuman	Status
2023	SELEKSI INTERNAL CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR TAHUN 2023	Tutup
2023	SELEKSI INTERNAL CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR SISTER CITY JAKARTA-SEOUL TAHUN 2023	Tutup

Showing 1 to 2 of 2 entries

Jadwal Kediklatan Badan Pengembangan Sumb Jakarta Tahun 2023

Show 10 entries

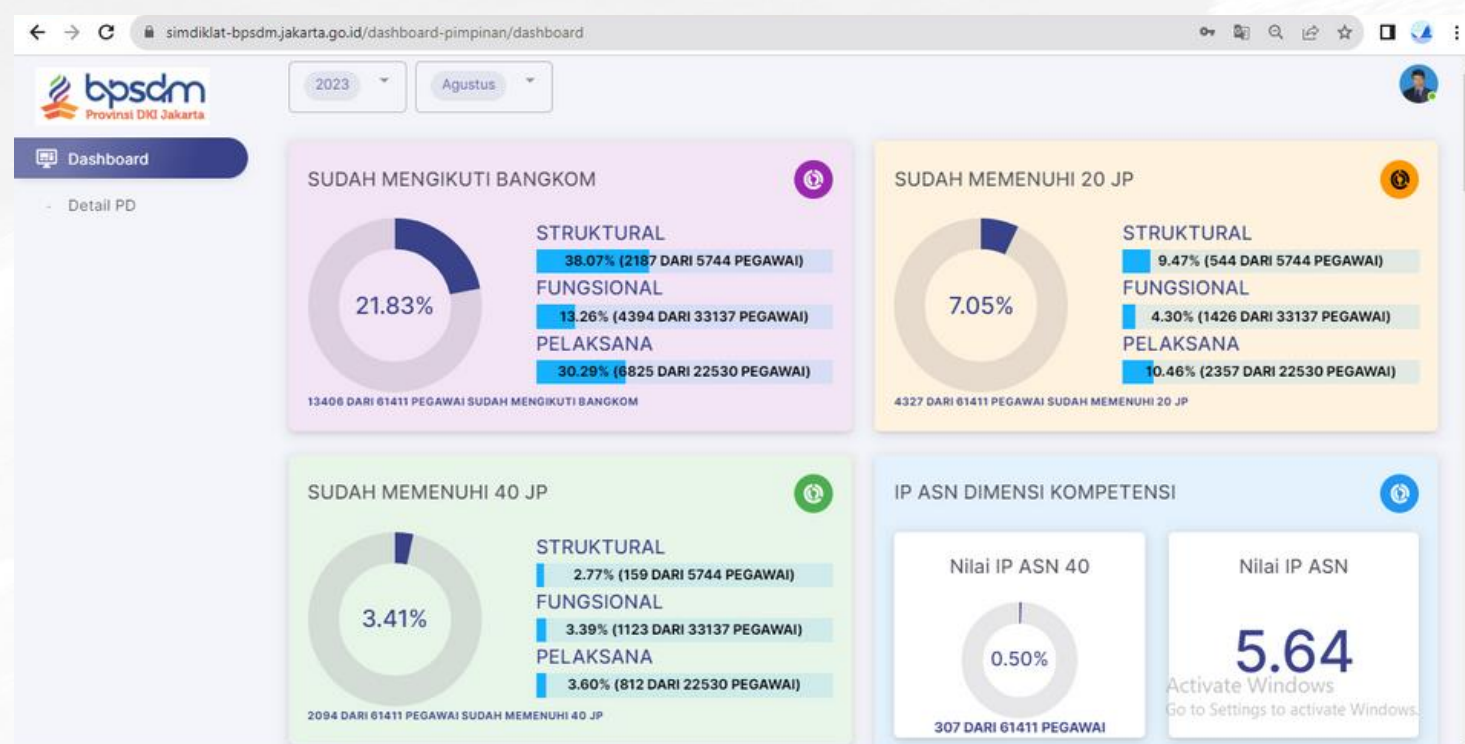
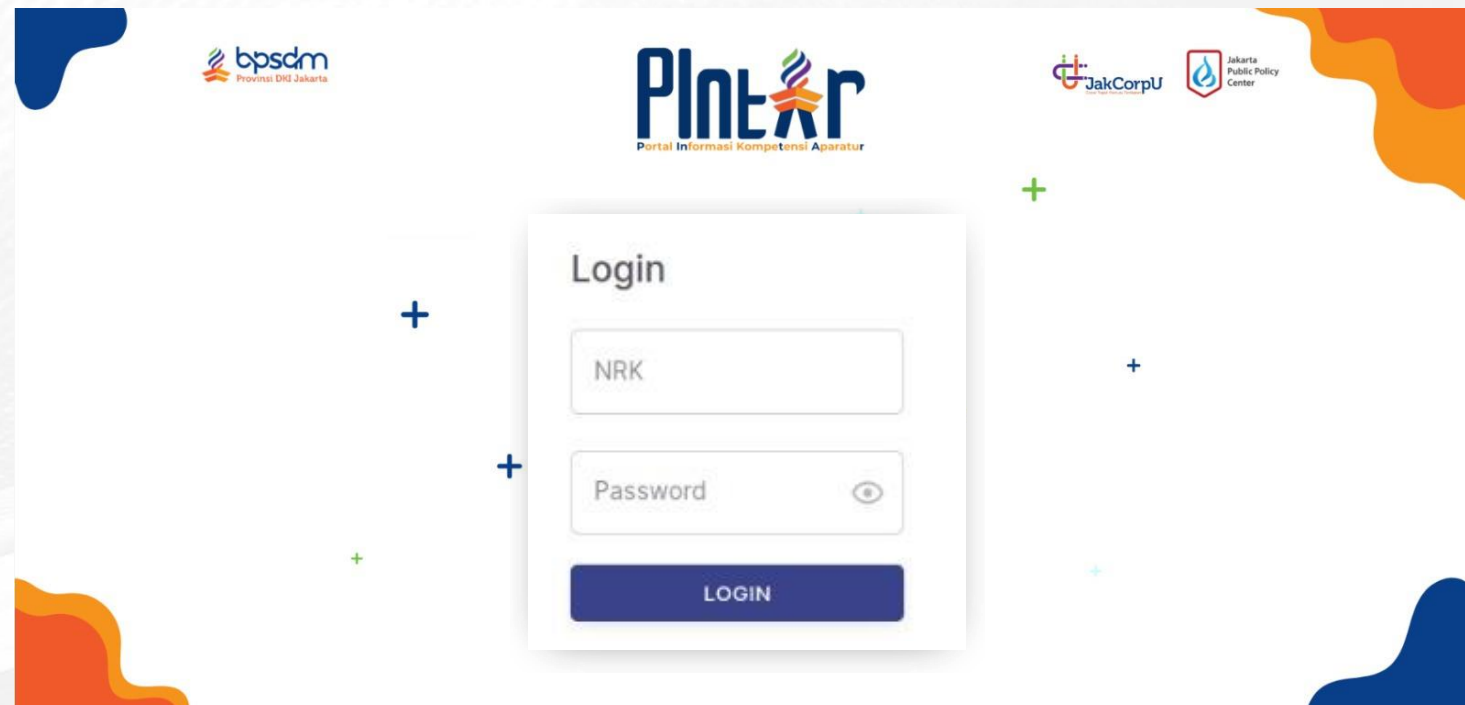
Jenis Diklat	Waktu Pelaksanaan	Tipe
-	Maret	Ge Pr
-	Februari	P2
-	Februari - Maret	P2
Bimbingan Teknis Majelis Kode Etik Dan Kode Perilaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Juni	Ge Mi
Bimtek Pengelolaan Aset	Maret - Juli	Ge Pr

Dapat dibuka dalam SIMDIKLAT

<https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id/>



Aplikasi Portal Informasi Kompetensi Aparatur (PINTAR) BPSDM Provinsi DKI Jakarta



Perangkat Daerah

Sudah Mengikuti Bangkom

- Nilai IP ASN DIMENSI KOMPETENSI \geq 38
- Nilai IP ASN DIMENSI KOMPETENSI $<$ 38

Nama Perangkat Daerah	Sudah Mengikuti Bangkom	IP ASN DIMENSI KOMPETENSI
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	100.00% (111 DARI 111)	31.62
Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta	99.21% (125 DARI 126)	18.51
Biro Perekonomian Dan Keuangan	97.44% (38 DARI 39)	19.35
Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	95.70% (245 DARI 256)	19.86
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	94.55% (104 DARI 110)	16.82
Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta	90.48% (38 DARI 42)	19.87
Biro Pemerintahan	86.49% (32 DARI 37)	15.98
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	84.47% (397 DARI 470)	18.64
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	80.26% (248 DARI 309)	18.62
Biro Kesejahteraan Sosial	78.13% (25 DARI 32)	15.92
Kota Administrasi Jakarta Selatan	75.38% (196 DARI 260)	20.64
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	68.00% (153 DARI 225)	16.54
Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta	67.54% (154 DARI 228)	17.59



TERIMA KASIH

SELASA, 15 AGUSTUS 2023